



**DINAS SOSIAL**



**2022**

**RENCANA KERJA  
SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH**



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu .....</b>	<b>5</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Sosial serta Analisis Kinerja Pelayanan Tahun 2020 .....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	11
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	11
2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKPD .....	12
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan .....	12
<b>BAB III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan .....</b>	<b>13</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	13
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	15
3.3 Program dan Kegiatan .....	15
<b>BAB IV Penutup .....</b>	<b>51</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang.**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sidoarjo tidak lepas dari pelaksanaan perwujudan Visi Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 yang berbunyi: “Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan” dengan Misi Sebagai Berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha;
2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan;
3. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan;
4. Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya; dan
5. Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah yang mendukung terlaksananya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai Dokumen Rencana Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah. Mengingat dalam penyusunannya Renja OPD memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang memuat kebijakan, rencana program, kegiatan dan kebutuhan anggaran indikatif yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS), dan dalam perencanaan program kegiatan akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.



3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pada tahun sebelumnya.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Rencana Kerja Dinas Sosial adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman penyusunan program kerja tahunan yang juga berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kerja agar lebih terarah selaras dengan Visi-Misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi masyarakat dengan fokus pada pelayanan dasar.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Renja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021;
2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 129.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penetapan RENJA dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor sosial tahun berjalan. Dokumen Renja SKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi yang termuat dalam RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022, serta untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka mewujudkan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo.



### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan RENJA Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
2. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam program dan kegiatan Dinas Sosial.
3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD.

### **1.4. Sistematika Penulisan.**

Penulisan Rencana Kerja ini dengan sistematika meliputi :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Sosial serta Analisis Kinerja Pelayanan Tahun 2020**

Terdapat 4 Program dan 21 Kegiatan pada Renja Dinas Sosial sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan
  - a. Penyediaan barang/jasa perkantoran
  - b. Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
  - c. Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah
  - d. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
  - e. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
  - f. Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur
  - g. Peningkatan kapasitas aparatur
  - h. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD
  - i. Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD
  - j. Penyusunan laporan keuangan
2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Lainnya
  - a. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
  - b. Fasilitasi dan Monev bantuan pangan APBN
  - c. Pengadaan Rastra APBD
  - d. Peningkatan kualitas kelembagaan sosial dan PSKS lainnya
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
  - a. Pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi penyandang disabilitas
  - b. Pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi tuna sosial
  - c. Pembinaan dan pelayanan sosial bagi anak dan lansia
  - d. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - a. Fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial
  - b. Perlindungan sosial korban bencana alam
  - c. Perlindungan sosial korban bencana sosial

Seiring dengan adanya Darurat Bencana Skala Nasional yaitu munculnya Pandemi *Corona Virus Desesase* (COVID-19) yang secara langsung merubah arah strategis terget capaian berdasarkan tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan tahun 2020 yang berorientasi pada Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan capaian 1,84% berubah menjadi realisasi 2,23%



dikarenakan banyaknya dampak yang ditimbulkan dari Darurat Bencana ini. Fokus capaian berdasarkan tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan Tahun 2020 dialih fungsikan sebagai bentuk percepatan yang dilakukan pemerintah daerah untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dengan tetap melaksanakan Program Prioritas Dinas Sosial yang sudah menjadi Standar Pelayanan Minimal dan wajib untuk terlaksana.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2020 sudah berjalan sebagaimana dengan yang diharapkan. Untuk lebih meningkatnya pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Kerja pada Tahun 2022 akurasi terhadap koordinasi, informasi, upaya deteksi dini, respon cepat sangat dibutuhkan untuk memenuhi percepatan pemulihan terhadap berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari darurat bencana yang berkaitan dengan urusan sosial.

Realisasi kegiatan dan anggaran Dinas Sosial Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1

**Realisasi Anggaran Tahun 2020**  
**Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
<b>0000201</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>5.875.251.730,00</b>	<b>5.237.210.320,00</b>	<b>638.041.410,00</b>	<b>89,14</b>
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.875.251.730,00	5.237.210.320,00	638.041.410,00	89,14
	<b>Jumlah</b>	<b>5.875.251.730,00</b>	<b>5.237.210.320,00</b>	<b>638.041.410,00</b>	<b>89,14</b>
<b>0000007</b>	<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>2.762.567.019,00</b>	<b>2.208.948.931,00</b>	<b>553.618.088,00</b>	<b>79,96</b>
0000007001	Penyediaan barang/jasa perkantoran	1.192.321.083,00	994.315.484,00	198.005.599,00	83,39
0000007002	Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	330.552.536,00	235.989.061,00	94.563.475,00	71,39
0000007004	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	651.599.800,00	515.188.500,00	136.411.300,00	79,07
0000007005	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	522.464.000,00	402.338.686,00	120.125.314,00	77,01
0000007008	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	62.538.800,00	58.891.000,00	3.647.800,00	94,17
0000007009	Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	1.500.000,00	743.800,00	756.200,00	49,59
0000007010	Penyusunan laporan keuangan	1.590.800,00	1.482.400,00	108.400,00	93,19
	<b>Jumlah</b>	<b>2.762.567.019,00</b>	<b>2.208.948.931,00</b>	<b>553.618.088,00</b>	<b>79,96</b>
<b>1010615</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>23.038.015.650,00</b>	<b>21.770.747.375,00</b>	<b>1.267.268.275,00</b>	<b>94,50</b>
1010615001	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	983.418.500,00	714.972.400,00	268.446.100,00	72,70
1010615005	Fasilitasi dan Monev Bantuan Pangan APBN	109.141.000,00	101.053.000,00	8.088.000,00	92,59
1010615006	Pembinaan Yayasan Panti Asuhan	28.965.350,00	27.305.350,00	1.660.000,00	94,27
1010615007	Pengadaan Rastra APBD	20.777.825.400,00	19.878.010.620,00	899.814.780,00	95,67
1010615008	Peningkatan kualitas kelembagaan sosial dan PSKS lainnya	1.138.665.400,00	1.049.406.005,00	89.259.395,00	92,16
	<b>Jumlah</b>	<b>23.038.015.650,00</b>	<b>21.770.747.375,00</b>	<b>1.267.268.275,00</b>	<b>94,50</b>
<b>1010616</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>2.418.731.200,00</b>	<b>2.049.092.697,00</b>	<b>369.638.503,00</b>	<b>84,72</b>
1010616012	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas	68.026.800,00	65.633.400,00	2.393.400,00	96,48
1010616013	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi tuna sosial	352.883.200,00	255.773.684,00	97.109.516,00	72,48
1010616014	Pembinaan dan Pelayanan Sosial bagi Anak dan Lansia	74.528.000,00	45.351.900,00	29.176.100,00	60,85
1010616015	Peningkatan kualitas pelayanan sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial	1.923.293.200,00	1.682.333.713,00	240.959.487,00	87,47
	<b>Jumlah</b>	<b>2.418.731.200,00</b>	<b>2.049.092.697,00</b>	<b>369.638.503,00</b>	<b>84,72</b>
<b>1010626</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>4.882.311.340,00</b>	<b>4.836.554.920,00</b>	<b>45.756.420,00</b>	<b>99,06</b>
1010626001	Fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial	168.828.840,00	148.644.920,00	20.183.920,00	88,04
1010626002	Perlindungan sosial korban bencana alam	218.482.500,00	211.657.500,00	6.825.000,00	96,88
1010626003	Perlindungan sosial korban bencana sosial	4.495.000.000,00	4.476.252.500,00	18.747.500,00	99,58
	<b>Jumlah</b>	<b>4.882.311.340,00</b>	<b>4.836.554.920,00</b>	<b>45.756.420,00</b>	<b>99,06</b>
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(38.976.876.939,00)</b>	<b>(36.102.554.243,00)</b>	<b>(2.874.322.696,00)</b>	<b>92,63</b>

Terdapatnya sisa anggaran tersebut berkenaan dengan adanya penghematan dari proses pengadaan barang dan jasa dan Pemeliharaan serta adanya Kegiatan Pelatihan yang tidak telaksana.



Tabel 2.2

Capaian Kinerja

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

	SASARAN	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
<b>Dinas Sosial</b>	Persentase Penurunan PMKS terhadap Penduduk	1,84	2,23	82,51%
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>	Persentase Fakir Miskin yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya	87 %	81 %	81 %
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	60 %	60 %	100 %
Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang dilatih	270	220	81,48 %
Fasilitasi dan Monev Bantuan Pangan APBN	Jumlah penerima Bantuan Sosial Pangan APBN yang di monev	97.350	97.350	100 %
Pengadaan Rastra APBD	Jumlah fakir miskin penerima bantuan sosial pangan APBD	140.572	140.572	100 %
Peningkatan Kualitas Kelembagaan sosial dan PSKS lainnya	Jumlah PSKS yang dibina	10	10	100 %
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</b>	Persentase tuna sosial yang terlayani	5,89%	5,89%	100 %
	Persentase Penyandang Disabilitas yang terlayani	1,94%	1,94%	100 %
	Persentase anak dan lansia bermasalah sosial yang terlayani	5,38%	5,38%	100 %
	Persentase PMKS yang terlayani	100%	75%	75 %



Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang di bina	20	20	100 %
	Jumlah Penyandang Disabilitas yang di monev	20	20	100 %
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Tuna Sosial	Jumlah PMKS yang di bina	120	120	100 %
	Jumlah PMKS yang di monev	120	120	100 %
Pembinaan dan Pelayanan Sosial bagi Anak dan Lansia	Jumlah anak dan lansia penyandang masalah kesejahteraan sosial yang di bina	250 anak	250 anak	100 %
	Jumlah anak dan lansia penyandang masalah kesejahteraan sosial yang di monev	250 anak	250 anak	100 %
Peningkatan kualitas pelayanan sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	900	675	75 %
	Persentase sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial yang layak fungsi	1	1	100 %
<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	Persentase korban bencana alam yang tertangani	100%	100%	100 %
	Persentase korban bencana sosial yang tertangani	100%	100%	100 %
	Persentase penduduk miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	70%	70%	100 %



Fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah peserta sosialisasi JKMM	-	-	0
	Jumlah Rekomendasi SKTM bagi masyarakat miskin	1.565	1.565	100 %
Perlindungan sosial korban bencana alam	Jumlah personil TAGANA yang di bina	50	50	100 %
	Pemeliharaan sarana prasarana bencana alam	7	7	100 %
	Jumlah korban bencana alam yang di tangani	2.238	2.238	100 %
Perlindungan sosial korban bencana sosial	Pemeliharaan sarana prasarana korban bencana sosial	1	1	100 %
	Jumlah korban bencana sosial yang di tangani	59.372	59.372	100 %



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan-tantangan Dinas Sosial yang berhasil teridentifikasi adalah sebagai berikut:

### **1. Tantangan**

Berdasarkan data dari bidang sosial, jumlah PMKS pada Tahun 2020 sebesar 44.645 jiwa. Hal ini terjadi karena kompleksnya permasalahan-permasalahan dalam penanganan PMKS (gelandangan, pengamen, anak jalanan, WTS, gelandangan psikotik) dan dampak darurat bencana pandemi Covid-19 sehingga meningkatkan jumlah PMKS maka perlu adanya strategi dalam menangani khususnya percepatan pemulihan ketahanan ekonomi masyarakat dengan fokus pada pelayanan dasar, respon cepat dan akurasi data yang memadai menjadi faktor penting tercapainya program-program yang berkaitan dengan urusan sosial tepat pada sasaran dan tujuan bersama Pemerintah Daerah. Akses pelaporan dan informasi yang mudah dan memadai perlu diperoleh masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik pada masyarakat khususnya urusan sosial masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

### **2. Peluang**

Peluang-peluang Bidang Sosial Kabupaten Sidoarjo yang berhasil teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Adanya potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai pilar-pilar partisipasi kesejahteraan sosial dalam mewujudkan akurasi data dan respon cepat yang memadai. Selain itu adanya LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) sebagai tempat pelayanan dan bimbingan sosial bagi penyandang masalah sosial. Banyaknya lembaga sosial yang dapat diperbantukan sebagai bentuk kerjasama Lembaga Sosial Masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisa permasalahan yang sudah dilakukan, terdapat beberapa isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yaitu antara lain :

1. Kecenderungan PMKS yang terus meningkat;
2. Penanganan PMKS yang masih rendah/belum optimal;



3. Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial masih kurang efektif;
4. Kurangnya partisipasi aktif dan pemutakhiran dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial;
5. Masih rendahnya efisiensi terhadap operasionalitas teknis administrasi perkantoran.

Penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo disusun untuk dilakukan pembenahan.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Sosial telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Sosial. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaian program yang mengalami perubahan. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial.

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Tidak ada Usulan program dan kegiatan masyarakat yang di Renja Tahun 2022.



### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

#### **3.1.1 Telaah Kebijakan Kementerian Sosial**

Kementerian Sosial Republik Indonesia memiliki kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan melalui:

a. Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar

Penguatan integrasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pangan dan subsidi energi melalui skema Program Sembako memanfaatkan transformasi digital dengan perluasan variasi dan manfaat bantuan pangan didukung skema pendampingan, koordinasi kelembagaan serta penguatan tata kelola sistem informasi manajemen dalam pengelolaan program bantuan guna tercapainya peningkatan verifikasi data penerima manfaat yang akurat dan andal.

Peningkatan kualitas dan standar rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin dan rentan dengan dukungan pengembangan kebijakan perlindungan sosial adaptif yang berfokus pada 3 (tiga) aspek yaitu perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana

b. Peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan

Pengembangan sistem rehabilitasi sosial yang didukung dengan adanya Penetapan Peraturan Menteri Sosial yang merupakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan guna terpenuhinya percepatan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar. Penguatan dan penyempurnaan mekanisme penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi penting untuk mendorong dan memperkuat skema layanan untuk keberfungsian sosial PPKS sebagai target utama layanan rehabilitasi sosial

Peningkatan kesadaran masyarakat sekitar serta dunia usaha untuk berkontribusi dan berperan aktif dirasa sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan PPKS di daerahnya.

c. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan



Peningkatan kualitas kompetensi pendamping keluarga miskin serta fasilitasi keluarga miskin kepada kewirausahaan atau bursa kerja serta menghubungkan dengan mitra usaha strategis dengan penguatan skema dan pendataan graduasi program bantuan sosial. Penguatan jejaring kerja dan kolaborasi usaha serta penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan sangat membantu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah sebagai bentuk kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha.

2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Perluasan peran yang selaras dengan insentif memadai, peningkatan kapasitas, peningkatan sertifikasi SDM kesejahteraan sosial dan akreditasi LKS sebagai upaya penguatan peran sebagai fasilitator, mediator, dan *enabler* untuk penanganan yang efektif dan memadai dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu.

Penguatan integrasi data terpadu baik secara program maupun sistem, penguatan skema layanan terpadu, sinkronisasi kebijakan regulasi, Peningkatan kualitas sistem informasi dan kualitas instrumen DTKS yang memasukkan indikator kemiskinan dan kerentanan multi dimensi, serta pengembangan metode perangkingan penduduk yang konsisten dengan sistem graduasi guna tercapainya Peningkatan pemutakhiran DTKS.

Penguatan skema perekaman dan pendataan kelompok rentan Adminduk yang selaras dengan Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan DTKS bagi SDM operator dan enumerator di tingkat daerah dalam pengelompokan PPKS yang akan di intervensi agar sasaran dan penanganan lebih terukur tanpa terkecuali pertimbangan perluasan cakupan DTKS apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam sebagai penerima manfaat di luar bantuan sosial regular. Diperkuatnya implementasi SPM Bidang Sosial khususnya terkait pendataan penduduk miskin dan rentan akan mendorong daerah mengembangkan pusat kesejahteraan sosialnya didukung dengan optimalisasi skema insentif pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sosial untuk mendukung pelaksanaan pendataan di kabupaten/kota.

Memperkuat pilar koordinasi pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan, dengan mengoptimalkan peran partisipatif secara tepat, cepat, efektif dan efisien, serta terintegrasi pada PSKS di level desa.



### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Rencana Strategis mengacu visi dan misi kepala daerah yang terpilih, untuk menyelaraskan maka perlu menerjemahkan sasaran RPJMD. Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan kepala daerah. Maka sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial berikut Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diakomodir oleh Dinas Sosial yaitu **“Menurunnya jumlah masyarakat miskin”** Penyelenggaraan pelayanan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang berfungsi memfasilitasi kegiatan-kegiatan sosial. Dinas Sosial memberikan pelayanan harus menetapkan suatu tujuan sebagai arahan Dinas Sosial dimasa yang akan datang. Penentuan Tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Tujuan adalah tahap perumusan yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Sosial selama lima tahun.

Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial wajib mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Sidoarjo yang dijabarkan pada sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Tujuan Dinas Sosial harus mengacu dengan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang telah ditetapkan yang sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas. Berikut tujuan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yakni **“Penurunan penduduk miskin”**.

Setelah menetapkan tujuan maka ditetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka Dinas Sosial menjabarkannya dalam sasaran, yaitu: **1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Warga dalam DTKS, 2. Menurunnya Jumlah Peduduk Miskin.**

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Sebagaimana dipahami bersama bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian perencanaan strategi adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat diukur dengan baik, dirumuskan dalam program serta dijabarkan dalam aktifitas atau kegiatan yang disusun dalam dimensi waktu (tahunan).

Program dan kegiatan Dinas Sosial terjadi perubahan nomenklatur program berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian terjadi



pemutakhiran dengan Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya perubahan tersebut yang sebelumnya terdapat 4 Program dan 21 Kegiatan menjadi 6 Program dan 9 Kegiatan dengan Sub kegiatan dan Plafon Anggaran Sementara secara detail dapat dilihat dari tabel Rencana Kerja Awal Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berikut:



**Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Sosial  
Kabupaten Sidoarjo  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial  
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolo k Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					69,852,939,655		0		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10,505,612,362		0		
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					144,122,500		0		
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen	127,475,200	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	N		0



1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKASKPD yang disusun tepat waktu	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	1,192,600	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	2,887,720	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPASKPD yang disusun tepat waktu	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	4,035,200	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	3,375,200	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0



1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Dokumen			0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Dokumen		5,156,580		PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,719,653,472					0	

1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Orang		5,716,394,612		PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
---	----	----	------	----	-----------------------------------	--	---	---	-------	--	---------------	--	------------------------------	---	--	--	---



1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Jenis			0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diterbitkan	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 SPM			0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan penatausahaan akuntansi keuangan PD yang disusun	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Laporan			0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Laporan		3,258,860		PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0



1	06	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan hasil pemeriksaan yang disusun	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Bahan			0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Laporan			0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Laporan			0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0			0		



1	06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD yang disusun		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan			PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD SKPD yang telah teregistrasi Jumlah BMD SKPD yang telah tersertifikasi		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit 0 Unit			PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD SKPD yang dilakukan penilaian		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit			PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD SKPD yang		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Kali			PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0



						dilakukan											
1	06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan 0 Kali			PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan			PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik Jumlah BMD		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit 0 Unit			PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0



						SKPD yang dimanfaatkan												
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							9,081,701						0
1	06	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi yang disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit		0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N				0

1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Stel		9,081,701	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N				0
1	06	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang diolah Jumlah administrasi		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan 0 Laporan		0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N				0



						kepegawaian yang disusun												
1	06	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan			0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Orang			0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua		0 Orang			0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0



					ndangan		Kelurahan										
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Orang			0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.06	Administrasi Umum Peran gkat Daerah							1,207,573,879					0	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit			11,955,588	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua		0 Jenis			33,799,541	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0



								Kelurahan											
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Jenis			0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N				0
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Liter 0 Unit		336,600,000	0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N				0
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan,		0 Lembar			0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N				0



							Semua Kelurahan										
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundangundangan dan koran yang tersedia	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Jenis		8,100,000	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N					0
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit		0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N					0
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan Jumlah kunjungan	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Kotak 0 Kali		17,118,750	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N					0



						tamu yang difasilitasi											
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Kali 0 %		800,000,000	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Arsip		0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0



1	06	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah data dan informasi PD yang tersedia	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Jenis			0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N				0	
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,313,712,672						0	
1	06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit			0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N				0	
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit			220,965,777	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N				0	
1	06	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit			0							0



								Kelurahan									
1	06	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang diadakan		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit		0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit	241,945,380		PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Jenis		0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0



1	06	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit			0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
---	----	----	------	----	------------------------------	---	---	--------	--	--	---	------------------------------	---	--	--	---

1	06	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit			0	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit		175,000,000		PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit		675,801,515		PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	N			0



1	06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit			0	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,211,490,800				0	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Surat			550,000	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Bulan			327,500,000	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %			0	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	N			0





1	06	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Jenis 0 Unit 0 STNK			0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0	
1	06	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Jenis 0 Unit 0 STNK	265,000,000			0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0



						Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya											
1	06	01	2.0 9	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara Jumlah Alat Besar yang diurus perijinannya	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit 0 Unit				0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.0 9	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diurus perijinannya	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit 0 Unit				0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0



1	06	01	2.0	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit				PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit				PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0

1	06	01	2.0	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit				PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.0	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit				PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0



1	06	01	2.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor /rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 M2	323,447,353	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	211,529,985	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	01	2.0 9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	100,000,000	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0



1	06	01	2.0 9	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang dipelihara/rehabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 M2			0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						5,138,529,323				0	
1	06	02	2.0 2		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota						382,280,667				0	
1	06	02	2.0 2	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				382,280,667	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	02	2.0 3		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						4,756,248,656				0	

1	06	02	2.03 01		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial	Jumlah PSM yang dibina	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan,	0 PSM			288,000,000	PENDAPAT A ASLI DAERAH	N			0
---	----	----	------------	--	--	------------------------	---------------------------------	-------	--	--	-------------	------------------------	---	--	--	---



					Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				Semua Kelurahan											(PAD)						
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang dibina			Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Orang									0						0
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mengikuti sosialisasi/pelatihan/bimtek			Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 %		432,000,000								0					0



1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKSA yang diberi pembinaan Jumlah LKSA yang difasilitasi jumlah peserta rakor/sosialisasi / saresehan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan Jumlah PSKS lainnya yang dibina	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 LKSA 0 LKSA 0 Orang 0 PSKS	3,341,047,152	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	Jumlah LK3 yang dibina	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Orang	695,201,504	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0



					Keluarga (LK3)														
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							10,497,920,870						0	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							8,677,162,706							0
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan				Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				7,884,695,000					0	
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang mendapat bantuan sandang			Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 anak			38,225,000	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0	



1	06	04	2.0 1	0 3	Penyediaan Alat Bantu				Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					100,750,000					0
1	06	04	2.0 1	0 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					560,188,350					0
1	06	04	2.0 1	0 6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					20,100,000					0



1	06	04	2.0 1	0 9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					73,204,356					0
1	06	04	2.0 1	1 0	Pemberian Layanan Kedaruratan				Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0					0
1	06	04	2.0 2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial									1,820,758,164					0
1	06	04	2.0 2	0 2	Pemberian Layanan Kedaruratan				Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					842,341,019					0
1	06	04	2.0 2	0 3	Penyediaan Permakanan				Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					801,353,145					0



1	06	04	2.0 2	0 4	Penyediaan Sandang				Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				33,239,000					0
---	----	----	----------	--------	--------------------	--	--	--	---	--	--	--	------------	--	--	--	--	---

1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Luar Panti	di			Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	N				0
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				143,825,000						0
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								39,864,695,255					0	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								39,864,695,255					0	



1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang diusulkan pada DTKS	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Jiwa	2,470,030,368	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola Jumlah Rekom JKMM yang dikeluarkan	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Jiwa 0 Jiwa	44,537,600	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah fakir miskin penerima Program Sembako Jumlah SDM PKH yang dimonev	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Jiwa 0 Orang	36,366,774,560	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	N			0



1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah keluarga miskin yang dilatih Jumlah keluarga miskin yang dimonev Jumlah Penerima KUBE yang dimonev Jumlah warga miskin yang memperoleh KUBE	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang	983,352,727	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				3,617,884,845					0
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				3,103,188,932					0

1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua		2,426,574,160	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
---	----	----	------	----	--------------------	--	---------------------------------------	--	---------------	------------------------------	---	--	--	---



								Kelurahan									
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang			Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			496,086,272		PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			180,528,500		PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	N			0



1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial			Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							514,695,913					0
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 KSB		0	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah rakor/sosialisasi yang terlaksana		Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Kali		514,695,913	PENDAPAT A ASLI DAERAH (PAD)	N			0
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							228,297,000					0
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							228,297,000					0



1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Sarpras yang direhab	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit			0	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	N				0	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras yang dipelihara	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit		155,502,200								0
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang diawasi	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 TMP		72,794,800		PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	N					0
TOTAL										69,852,939,655							0	



**BAB IV**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja SKPD ini merupakan pedoman tertulis secara terinci yang meliputi seluruh program kerja tahun 2022 pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo mengacu kepada RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 yang didalamnya memuat Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. Renja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo ini akan dijabarkan dalam bentuk RKA-SKPD yang disusun.

Untuk mencapai tujuan Renja ini perlu dibangun komitmen dan kesepakatan dari semua Stakeholder dan mendapatkan dukungan yang optimal dalam tahapan implementasinya.

Sidoarjo,

2021

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SIDOARJO**

**Dr. TIRTO ADI, M.Pd**

Pembina Tk. I

NIP. 196605111998021003